

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum SKPD	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
2. Keadaan Pegawai	5
BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
BKPP KOTA Banjarbaru	7
A. Visi dan Misi Kota Banjarbaru	7
B. Tujuan dan Sasaran	8
C. Strategi dan Arah Kebijakan	9
D. Program Kegiatan	10
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	12
A. Indikator Kinerja Kunci Fungsi	
Penunjang Urusan Pemerintahan	12
B. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan	13
C. Realisasi Anggaran Pelaksanaan	
Program Kegiatan Tahun 2023	17
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	20

LAMPIRAN :

- Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten Kota
- Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
- Data Pegawai Pemerintah Menurut Pendidikan Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Data ASN Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023
- Data Pegawai Pemerintah Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan
- Data Pegawai Fungsional Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan
- Data Pegawai Jabatan Fungsional yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Pemko Banjarbaru Tahun 2023
- Data Guru Pemko Banjarbaru Tahun 2023
- Data Tenaga Kesehatan Pemko Banjarbaru Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Laporan Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
8. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
9. Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 100.1.6/9/I/SETDAKO/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Permintaan Data Laporan Tahunan SKPD untuk Penyusunan LPPD Tahun 2023.

B. Gambaran Umum SKPD

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menjalankan fungsi sebagai berikut:

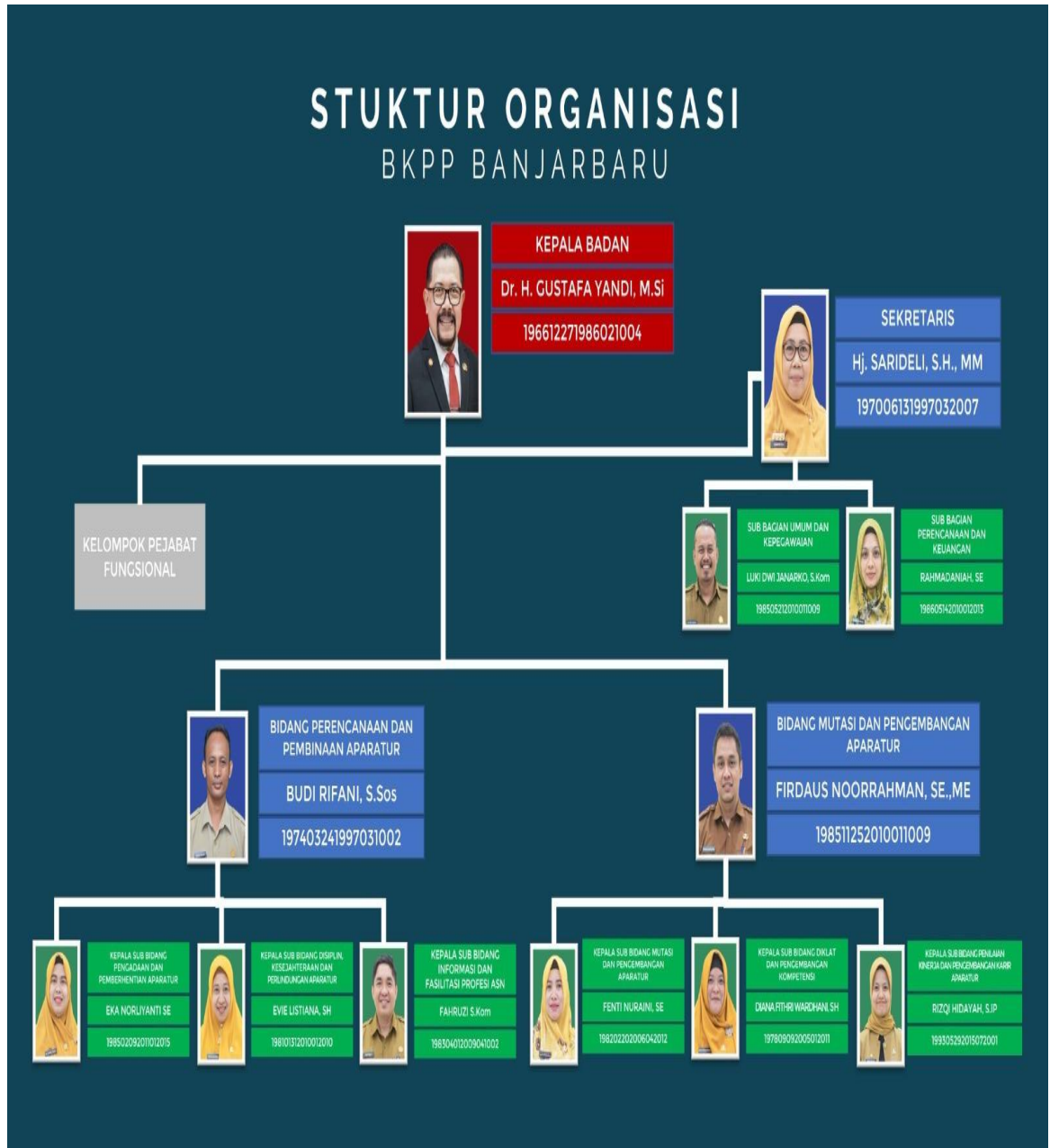
1. Tugas Pokok dan Fungsi :
 - a. Penyusun kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas masing-masing unit kerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan mempunyai Tugas:
 - Merumuskan program kerja BKPP berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja BKPP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar kegiatan berjalan sesuai rencana;
 - Membina administrasi dan aparatur di lingkungan pemerintah daerah secara berkala guna meningkatkan kualitasnya;
 - Mengarahkan penyusunan strategi dan kebijakan Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi agar kebijakan tepat sasaran;
 - Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja (PK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan Badan berdasarkan ketentuan yang ada agar tercipta tertib ketatausahaan;
 - Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan aparatur, pembinaan aparatur, mutasi aparatur dan pengembangan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di lingkungan Badan dalam optimalisasi sumber daya yang ada;
 - Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kontrol akuntabilitas pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai fungsi
- Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi :
- Penyusunan program di bidang perencanaan dan pembinaan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
 - Pengendalian, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan jabatan, pengadaan pegawai ASN, penyusunan informasi kepegawaian, pemrosesan status dan kedudukan hukum kepegawaian, pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan fasilitasi profesi ASN
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :
- Penyusunan program di bidang mutasi dan pengembangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
 - Pengendalian, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, pengembangan karier dan promosi pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
- Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

2. Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru :

tabel 1.1 Daftar Pegawai BKPP Kota Banjarbaru

No	Nama	Pangkat/ (Gol/Ruang)	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4	5
Sekretariat				
1	Dr. H. Gustafa Yandi, M.Si	IV/b	Kepala Badan	S2
2	Hj. Sarideli, SH, MM	IV/a	Sekretaris Badan	S2
3	Luki Dwi Janarko, S.Kom	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
4	Akhmad Budianoor, A.Md	III/a	Penyusun Kebutuhan Barang	D3
5	Zubaidah, SE	III/a	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	S1
6	Rizkan Syarif, A.Md	VII	Pranata Komputer Terampil	D3
7	Rahmadaniah, SE	III/b	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S1
8	Kartini, A.Md	III/b	Bendahara	D3
9	Laila Adha, S.Sos	III/b	Verifikator Keuangan	S1
Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur				
1	Budi Rifani, S.Sos	III/d	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	S1
2	Evie Listiana, SH	III/c	Kasubbid Disiplin Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur	S1
3	Erlinda Maharani Puspita Sari, SH	III/b	Analisis Pelanggaran Disiplin	S1
4	Dodik Purnomo	II/d	Pengelola Disiplin Pegawai	SMA
5	Siti Rahmah, S.AP	IX	Analisis SDM Aparatur	S1
6	Dwi Rahayu, S.Sos	IX	Analisis SDM Aparatur	S1
7	Eka Norliyanti, SE	III/c	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur	S1
8	Yulliana Sofiah	II/c	Pengelola Kepegawaian	SMA
9	Fatmadia Setyaningrum, S.Tr.IP	III/a		S1
10	Adinda Oya Duaty, S.Psi	III/a	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
11	Fahruzi, S.Kom	III/d	Kasubbid Informasi & Fasilitas Profesi ASN	S1
12	Galuh Wulandari, A.Md	II/c	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	D3
13	Raidatul Hasanah, A.Md	II/c	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	D3
14	Septiatama Aditya Ismawan, S.Kom	IX	Pranata Komputer	S1
Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur				
1	Firdaus Noorrahman, SE, ME	III/d	Kabid Mutasi & Pengembangan Aparatur	S2
2	Fenti Nuraini, SE	III/a	Kasubbid Mutasi & Kepangkatan Aparatur	S1
3	Nur Prasetyo Santoso	II/b	Pengadministrasi Umum	SMA
4	Rizqi Hidayah, S.IP	III/b	Kasubbid PKPKA	S1
5	Adin Nur Rizky	II/d	Pengelola Kerja	SMA
6	Diana Fithri Wardhani, SH	III/d	Kasubbid Diklat & Pengembangan	S1

			Kompetensi Aparatur	
7	Ahmad Rifani	III/b	Pranata Diklat	SMA
8	Aida Rokayah, A.Md	III/a	Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur	D3
9	Nur Ika Amalia, SE	III/a	Analisis Diklat	S1
10	Riszky Adhini Rahmi, S.Psi	III/a	Analisis Diklat	S1
11	Bayu Ismunadi, S.Sos	IX	Analisis SDM Aparatur	S1
Jabatan Fungsional				
1	Rama Dhipayana, A.Md	III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D3
2	Riana Yulianti, S.Kom	III/c	Pranata Komputer Muda	S1
3	Siti Hadijah Humaira, A.Md	III/a	Pranata Komputer Pelaksanaan Lanjutan	D3
4	Lenni Marlina Simanjuntak, S.Sos	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
5	Muhammad Faruq Mubarak, S.AP	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
6	Muhammad Ilham Akbar, S.M	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
7	Ridha Jenia, S.M	III/a	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S1
8	Amelia, A.Md	II/c	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D3
9	Annya Deshelvi, A.Md	II/c	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D3
10	Fitri BR Sembiring, A.Md	II/c	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D3
Tenaga Non PNS				
1	Dwi Erlina Rosanty, SM	-	Pengadministrasian Kepegawaian	S1
2	Nurul Salsha Maulidania	-	Pramu Bakti	SMK
3	Herry Indrawan, A.Ma	-	Pramu Bakti	D2
4	Yuri Rahmitha, SE	-	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
5	Mas Abdusyahid, S.Ag	-	Pengadministrasian Umum	S1
6	Punikan	-	Pengadministrasian Umum	SMA
7	Hamdiani	-	Pengelola Data	S1
8	Salihin, A.Md	-	Pengelola Data	D3
9	Yandi Hermawan, SE	-	Pengadministrasian Umum	S1
10	Saukani, SE	-	Analisis Kinerja	S1
11	Surya Dharma, S.Psi	-	Analisis Diklat	S1
12	Nurul Latifah,	-	Pramu Bakti	S1
13	Siti Maimunah	-	Pramu Bakti	S1
14	Syifa Fitria	-	Perawat	D3

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU

A. Visi dan Misi Kota Banjarbaru

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 dengan Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu sebagai berikut :

Visi : Banjarbaru Maju, Agamis Dan Sejahtera (JUARA)

Dengan pengertian sebagai berikut :

- Maju adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan dengan segala potensi
- Agamis adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur
- Sejahtera adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik

Misi :

- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia
- Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Misi yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah Misi ke-3 yaitu : “ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah** “ dengan Indikator Tujuannya adalah “ **Indeks Reformasi Birokrasi** “. Adapun posisi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah berada pada Sasaran ke-1 (satu) yaitu : “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian internal Pemerintah Daerah**“, dengan indikator sasaran adalah “ **Indeks Profesionalitas ASN**”

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu keinginan.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru 6 tahun kedepan telah menyesuaikan dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu : **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengendalian Internal Perangkat Daerah “**, dengan indikator tujuannya yaitu **“Indeks Profesionalitas ASN”**.

2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sama dengan tujuan, sasaran perangkat daerah juga harus berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN
- Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Banjarbaru
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pemahaman terhadap literitas Misi, Tujuan hingga Sasaran serta Indikator dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi ke-3 yang disajikan sebagai berikut :

tabel 2.1 Desain Logical Framework

MISI 3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH		
TUJUAN TERUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BEBAS KKN		
INDKATOR TUJUAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI		
SASARAN		
SASARAN KE-1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH	SASARAN KE-2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	SASARAN KE-3 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
Indikator Sasaran 1	Indikator Sasaran 2 :	Indikator Sasaran 3 :
- Nilai SAKIP	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Nilai LPPD	- Indeks Kepatuhan	
- Opini BPK		
- Indeks Penerapan Manajemen Resiko		
- Indeks Profesionalitas ASN		

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun Strategi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru menetapkan 2 (dua) strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk program-program yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan SDM
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah tindakan yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan ASN
2. Pengadaan ASN
3. Peningkatan Pengembangan Karir ASN
4. Promosi dan Mutasi
5. Optimalisasi Manajemen Kinerja ASN
6. Optimalisasi Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
7. Optimalisasi Perlindungan dan Pelayanan
8. Optimalisasi Sistem Informasi ASN
9. Pangkat dan Jabatan
10. Pemberhentian
11. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

D. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Kegiatan Setrifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

BAB. III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai fungsi penunjang, yang mana termasuk dalam urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dibawah ini adalah 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci Outcome Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru beserta cara perhitungannya :

A. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten Kota

1. IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (Seluruh PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

tabel 3.1

$$\text{Rumus :} \\ \frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas}}{\text{seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100 \%$$

2. IKK Outcome : Rasio Pegawai Fungsional (%) (Seluruh PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

tabel 3.2

$$\text{Rumus :} \\ \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{seluruh jumlah pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

3. IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (Seluruh PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

tabel 3.3

$$\text{Rumus :} \\ \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$$

B. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Urusan Kepegawaian).

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

tabel 3.4

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Data PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang terupdate	100%	Subbid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN
2	Jumlah Pegawai Fungsional yang telah diangkat kedalam jabatan fungsional	2.263 orang	Subbid Mutasi dan Kepangkatan Aparatur
3	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	189 orang	

a. Rasio Data PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang terupdate.

Jumlah pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 4.176 orang, dengan rincian jabatan fungsional (PNS) guru 1.120 orang, PNS tenaga kesehatan 844 orang, PNS jabatan fungsional tertentu lainnya 299 orang, jabatan struktural 574 orang, jabatan fungsional umum (PNS) 799 orang, PPPK Guru 426 orang, PPPK Kesehatan 61 orang dan PPPK teknis sebanyak 53 orang. Data jumlah pegawai tersebut dapat dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dan dapat diakses dengan menggunakan User dan Password dari masing – masing Pegawai yaitu Nama Lengkap dan NIP yang bersangkutan. Dalam Aplikasi SIMPEG tersebut data kepegawaian bersifat dinamis selalu mengalami perubahan / Update setiap harinya, dan terus dipantau oleh Admin BKPSDM yang menangani SIMPEG.

b. Rasio Pegawai Fungsional yang telah diangkat kedalam Jabatan Fungsional.

Pegawai Fungsional yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2023 berjumlah sebanyak 2.263 orang pegawai fungsional dengan masing – masing jabatan fungsionalnya, dan telah diangkat seluruhnya kedalam jabatan fungsional.

Dari jumlah tersebut pegawai fungsional yang berasal dari tenaga guru sebanyak 1.120 orang, tenaga kesehatan berjumlah sebanyak 844 orang dan pegawai fungsional lainnya adalah sebanyak 265 orang (daftar terlampir).

- c. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi. Dari total jumlah pegawai fungsional sebanyak 2.269 orang terdapat 265 orang jabatan fungsional tertentu, dari 265 orang tersebut terdapat 189 orang pejabat fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi (Uji Kompetensi) yang terdata sampai dengan 31 Desember 2023 (daftar terlampir).

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

tabel 3.5

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	550,95 %	Subbid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN
2	Rasio pegawai fungsional (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,40 %	Subbid Mutasi dan Kepegawaian Aparatur
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,69 %	

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah sebesar 550,95%, berdasarkan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.1). Data yang diambil adalah jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma sampai dengan Sarjana sebanyak 1.449 orang dibagi dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kebawah sebanyak 263 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Banjarbaru mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah.

b. Rasio Pegawai Fungsional.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Fungsional (PNS) lainnya yang diluar PNS Guru serta Tenaga Kesehatan adalah sebesar 20,40 %, yang didapat berdasarkan pada perhitungan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.2) yaitu jumlah pegawai fungsional lainnya (PNS) diluar PNS guru dan kesehatan sebanyak 352 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai (PNS) Pemerintah Kota Banjarbaru di Luar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan yaitu 1.725 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jumlah seluruh pegawai (PNS) di Pemerintah Kota Banjarbaru diluar PNS Guru dan Kesehatan terdiri dari Jabatan Struktural baik Eselon II, III dan IV berjumlah 574 orang, Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya (PNS) sebanyak 299 orang dan Jabatan Fungsional Umum (PNS) sebanyak 799 orang.

Beberapa permasalahan bagi Pemerintah Daerah terkait jabatan fungsional diantaranya :

- Masih kurangnya minat PNS untuk beralih ke jabatan fungsional dikarenakan terdapat anggapan bahwa penghasilannya (take home pay) yang masih rendah.
- Masih kurangnya pemahaman terkait pengembangan karir jabatan fungsional yakni tentang kenaikan jenjang, perpindahan jenjang, dan ketentuan pemberhentian jenjang.
- Ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diusulkan berdasarkan perhitungan ANJAB dan ABK dari masing – masing SKPD masih sangat terbatas.
- Belum adanya Tim Penilai Angka Kredit secara menyeluruh di daerah, sehingga untuk pengembangan karir jabatan fungsional akan melakukan penilaian untuk beberapa jabatan fungsional masih harus menyampaikan ke Instansi Pembina Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Kab/ Kota terdekat.
- Masih adanya pemikiran bahwa Jabatan Fungsional bukanlah jabatan karir akan tetapi hanya merupakan jabatan alternatif atau bahkan jabatan hukuman.

c. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi.

Capaian kinerja untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 53,69 %, yang didapat berdasarkan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.3), Yaitu jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 189 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan sebanyak 352 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jabatan fungsional

tertentu diluar Guru dan Tenaga Kesehatan yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berjumlah 352 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 189 orang. Pada Tahun 2023 Instansi Pembina sesuai dengan Permenpan 1 Tahun 2023 telah mewajibkan mengikuti uji kompetensi , kecuali pada pengangkatan pertama jabatan fungsional. Sampai dengan Tahun 2023 Pegawai Fungsional yang telah mengikuti Uji Kompetensi sebagai berikut :

tabel 3.6
Daftar Jumlah Pegawai Fungsional
Yang Telah Melaksanakan Uji Kompetensi s/d Tahun 2023

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	9 orang
2	Bappeda	7 orang
3	Inspektorat	32 orang
4	RSDI	2 orang
5	BKPP	3 orang
6	Dinas Kesehatan	3 orang
7	Dinas Kominfo	3 orang
8	Satpol PP	19 orang
9	Dinas Perhubungan	3 orang
10	DKP3	24 orang
11	Dinas Dukcapil	9 orang
12	Badan kesbangpol	1 orang
13	Dinas Koperasi UMKM	9 orang
14	Dinas Perdagangan	4 orang
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5 orang
16	Setdako	6 orang
17	DPMPSTSP	1 orang
18	BPKAD	1 orang
19	Dinas Perkim	1 orang
20	Dinas PUPR	4 orang
21	Set DPRD	1 orang
22	Kecamatan	6 orang
23	Kelurahan	23 orang
24	Setdako Bagian PPBJ	8 orang
25	Setdako Bagian Hukum	4 orang
26	Setdako Bagian Ekobang	1 orang
27	Setdako Bagian Humas	1 orang
	TOTAL	189 orang

C. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

tabel 3.7
Serapan / Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun Anggaran 2023

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
Belanja Operasi :	15.952.661.730	13.452.582.708	2.500.079.022
- Belanja Pegawai	5.303.606.940	4.743.124.632	560.482.308
- Belanja Barang & Jasa	10.649.054.790	8.709.458.076	1.939.596.714
Belanja Modal :	1.604.167.000	1.549.175.000	54.992.000
- Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.281.116.000	1.227.230.000	53.886.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.000.000	286.945.000	1.055.000
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya	35.051.000	35.000.000	51.000
Total	17.556.828.730	15.001.757.708	2.555.071.022

tabel 3.8
Serapan / Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Non Kegiatan	5.303.606.940	4.743.124.632	560.482.308	89	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.673.250	31.669.750	3.500	99,99	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	66.483.750	63.210.250	3.273.500	95,08	100
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.749.000	9.748.500	500	99,99	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.116.800	23.116.800	-	100	100
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD</i>					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	13.110.000	11.556.896	1.553.104	88,15	100
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.823.000	35.822.500	500	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.999.500	241.109.500	8.890.000	96,23	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	65.000.000	-	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.998.000	1.998.000	-	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	597.480.156	2.519.844	99,58	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.051.000	35.000.000	51.000	99,85	
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000	468.700.000	17.606.000	96,38	100
Pengadaan Mebel	203.370.000	202.570.000	800.000	99,61	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.000.000	167.260.000	2.740.000	98,39	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.000.000	197.000.000	1.000.000	99,49	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.440.000	68.500.000	2.940.000	95,88	100

<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	13.922.993	1.077.007	92,82	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.087.040	122.054.440	6.032.600	100	100
<i>Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.000.000	38.000.000	0	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.400.000	106.742.500	6.657.500	94,13	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	-	100	100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	20.000.000	-	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.945.000	55.000	99,94	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000	18.000.000	0	100	100
Program Kepegawaian Daerah					
<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>					
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	81.635.400	80.135.400	1.500.000	98,16	100
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	788.204.950	717.275.085	70.929.865	91,00	100
Koordinasi Pelaksana Administrasi Pemberhentian	167.900.900	154.432.900	13.468.000	91,98	100
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	405.000.000	379.691.500	25.308.500	93,75	100
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	244.999.900	241.796.800	3.203.100	98,69	100
<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>					
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	224.989.000	204.127.167	20.861.833	90,73	100
Pengelolaan Promosi ASN	2.242.559.300	1.476.045.300	766.514.000	65	100
<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>					
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	740.520.500	466.894.500	273.626.000	63	100
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	44.698.000	41.998.750	2.699.250	93,96	100
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	60.599.000	57.233.000	3.366.000	94,45	100
<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>					
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	582.648.900	422.122.800	160.526.100	72,45	100
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	39.999.900	38.049.900	1.950.000	95,12	100
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	73.199.000	63.699.000	9.500.000	87,02	100
Pembinaan Disiplin ASN	81.864.000	78.364.000	3.500.000	95,72	100
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	45.000.000	40.270.000	4.730.000	89,49	100
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	9.999.900	9.999.900	0	100	100
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					
<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>					
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.890.418.000	1.843.823.678	46.594.322	97,54	100
<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>					
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.884.007.800	1.349.626.111	534.381.689	71,64	100
Total	17.556.828.730	15.001.757.708	2.555.071.022	85,45	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Penyusunan Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang sudah ditargetkan pada awal tahun, dan secara khususnya untuk mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang menjalankan fungsi penunjang dalam urusan kepegawaian.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada awal tahun dengan realisasi capaian anggaran tahun 2023 Rp. 17.556.828.730,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.001.757.708,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 85,45 % dan capaian realisasi kinerja (fisik) sebesar 100 %. Khususnya untuk sumber daya manusia telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan, akan tapi masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang dalam urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, adalah :

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah sebesar 550,95%, berdasarkan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.1). Data yang diambil adalah jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma sampai dengan Sarjana sebanyak 1.449 orang dibagi dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kebawah sebanyak 263 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Banjarbaru mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah.

2. Rasio Pegawai Fungsional.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Fungsional (PNS) lainnya yang diluar PNS Guru serta Tenaga Kesehatan adalah sebesar 20,40 %, yang didapat berdasarkan pada perhitungan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.2) yaitu jumlah pegawai fungsional lainnya (PNS) diluar PNS guru dan kesehatan sebanyak 352 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai (PNS) Pemerintah Kota Banjarbaru di Luar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan yaitu 1.725 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jumlah seluruh pegawai (PNS) di Pemerintah Kota Banjarbaru diluar PNS Guru dan Kesehatan

terdiri dari Jabatan Struktural baik Eselon II, III dan IV berjumlah 574 orang, Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya (PNS) sebanyak 299 orang dan Jabatan Fungsional Umum (PNS) sebanyak 799 orang.

Beberapa permasalahan bagi Pemerintah Daerah terkait jabatan fungsional diantaranya :

- Masih kurangnya minat PNS untuk beralih ke jabatan fungsional dikarenakan terdapat anggapan bahwa penghasilannya (take home pay) yang masih rendah.
- Masih kurangnya pemahaman terkait pengembangan karir jabatan fungsional yakni tentang kenaikan jenjang, perpindahan jenjang, dan ketentuan pemberhentian jenjang.
- Ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diusulkan berdasarkan perhitungan ANJAB dan ABK dari masing – masing SKPD masih sangat terbatas.
- Belum adanya Tim Penilai Angka Kredit secara menyeluruh di daerah, sehingga untuk pengembangan karir jabatan fungsional akan melakukan penilaian untuk beberapa jabatan fungsional masih harus menyampaikan ke Instansi Pembina Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Kab/ Kota terdekat.
- Masih adanya pemikiran bahwa Jabatan Fungsional bukanlah jabatan karir akan tetapi hanya merupakan jabatan alternatif atau bahkan jabatan hukuman.

3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi.

Capaian kinerja untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 53,69 %, yang didapat berdasarkan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.3), Yaitu jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 189 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan sebanyak 352 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jabatan fungsional tertentu diluar Guru dan Tenaga Kesehatan yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berjumlah 352 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 189 orang. Pada Tahun 2023 Instansi Pembina sesuai dengan Permenpan 1 Tahun 2023 telah mewajibkan mengikuti uji kompetensi , kecuali pada pengangkatan pertama jabatan fungsional.

B. Saran

Dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru perlu meningkatkan kerjasama dan kompetensi aparatur agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Terkait beberapa permasalahan mengenai jabatan fungsional berikut beberapa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada ASN tentang peran penting jabatan fungsional, dimana jabatan fungsional adalah jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengangkatan jabatan fungsional melalui formasi CPNS dan PPPK.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dari seluruh SKPD tentang perhitungan ANJAB dan ABK terutama untuk jabatan fungsional.
4. Memfasilitasi pengembangan karir jabatan fungsional, memberikan informasi terkait perubahan peraturan yang berlaku saat ini yang terupdate.
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga penyelenggara beasiswa untuk dapat mengikutsertakan PNS Kota Banjarbaru mengikuti Seleksi Tugas Belajar.

Banjarbaru, Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Dr. H. GUSTAFA YANDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 004